

---

---

## Analisis Penentuan Pusat Pelayanan Perkotaan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Lucky Satria Pratama<sup>1</sup>, Sri Wahyuni<sup>2</sup>, Prety Sapahira<sup>3</sup>, Cindy Indah Yani<sup>4</sup>, Kartika<sup>5</sup>, Muhammad Faiz<sup>6</sup>, Roffi Rivaldo Arya Suta<sup>7</sup>, Wahyu Habib Wardhana<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Universitas Asahan; Indonesia

correspondence e-mail\*, luckysatriapratama27@gmail.com, sri435268@gmail.com, pretisapahiraa@gmail.com, cindyindahyani02@gmail.com, kartika1903@icloud.com, muhammadpais542@gmail.com, roviervaldo@gmail.com, habibw465@gmail.com

---

Submitted: Revised: 2024/01/21 Accepted: 2024/01/21 Published: 2024/03/06

### Abstract

This analysis was carried out to identify districts/cities that could be grouped into candidate service centers based on educational, economic, health and social facilities. The type of data used in this research is secondary data. The data collection method used was a literature review taken from the Central Statistics Agency (BPS). Next, the data was analyzed using scalogram analysis and centralization index analysis. The results of this research show that the areas that are urban service centers are located in Hierarchy I, namely the Regency/City of Tapanuli Utara, Toba, Dairi, Nias Selatan, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Medan, and Binjai. This district/city can be used as an urban service center in the North Sumatra Province region.

### Keywords

Hierarchy, Service Center, Urban



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Utara telah diidentifikasi sebagai kawasan andalan, yang mencakup aspek budi daya di daratan dan perairan, dengan fokus pembangunan bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut serta daerah sekitarnya. Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah perencanaan susunan pusat-pusat pemukiman/kegiatan dan sistem jaringan prasarana serta sarana (terutama sistem jaringan transportasi) yang bertindak sebagai pendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pusat-pusat pemukiman ini memiliki hubungan fungsional secara hierarki dan berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan distribusi barang/jasa. Pertumbuhan pusat pemukiman tersebut akan bersifat bertingkat/berhierarki sesuai dengan fungsi

dan perannya, baik sebagai pusat pengembangan maupun pusat kegiatan.<sup>1</sup> Kawasan strategis provinsi adalah bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diberikan prioritas karena memiliki dampak yang sangat signifikan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan di tingkat provinsi.<sup>2</sup>

Untuk mencapai pemerataan layanan, prasarana, dan sarana perkotaan di seluruh wilayah, dilakukan pembagian pusat-pusat pelayanan di dalam kota. Penyebaran pusat-pusat pelayanan ini disusun secara hierarkis, disesuaikan dengan kelengkapan fasilitas dan skala pelayanan. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat dan perkembangan pesat di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, perlu juga peningkatan berbagai fasilitas perkotaan sebagai faktor peningkatan pusat layanan. Kabupaten/Kota yang memiliki fasilitas terbaik akan menjadi pusat pertumbuhan, sehingga menciptakan hierarki di setiap Kabupaten/kota.<sup>3</sup> Jenjang fungsi perkotaan tercermin dalam hierarki kota sebagai hasil dari variasi dalam jumlah, jenis, dan kualitas fasilitas yang tersedia di setiap kota. Dari variasi ini, volume dan keragaman layanan yang dapat diberikan oleh setiap jenis fasilitas juga mengalami perbedaan. Perbedaan fungsi ini umumnya terkait langsung dengan karakteristik wilayah, cakupan pengaruh, dan jumlah penduduk yang signifikan.<sup>4</sup>

### **Pusat Pelayanan**

Walter Christaller (1933) Teori *Central place* atau pusat pelayanan adalah terbentuknya suatu hierarki kota disebabkan oleh kota-kota yang menyediakan barang dan jasa untuk penduduk di sekitar wilayah perkotaan, dengan mempertimbangkan jangkauan (*range*) dan ambang batas (*threshold*) penduduk. Dengan adanya pembagian hierarki layanan, sebuah kota secara alami memiliki potensi daya tarik yang signifikan dan memberikan dampak besar terhadap daerah-daerah yang memiliki kekuatan yang lebih rendah. Kota tersebut memiliki kemampuan untuk menarik potensi dan sumber daya dari daerah dan kota yang berada di bawahnya. Maka dari itu, inti dari teori pusat pelayanan adalah lokasi sebagai pusat penyedia barang dan jasa untuk daerah sekitarnya. Dengan dasar ini, wilayah perkotaan dianggap sebagai pusat kegiatan ekonomi untuk wilayah-wilayah di sekitarnya.<sup>5</sup>

### **Gambaran Umum Wilayah Provinsi Sumatera Utara**

Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara Ibu Kota Medan, Terletak antara 10 - 40 LU, 980 - 1000 B.T. Batas wilayahnya sebelah utara provinsi Aceh dan Selat Sumatera, sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan Riau, sedangkan sebelah Timur di batasi oleh Selat Sumatera.



**Gambar 1. Peta Sumatera Utara<sup>6</sup>**

<sup>1</sup> Tata, Wilayah, and Sumatera, "BAB 3 Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara."

<sup>2</sup> Admin, "Potensi Pengembangan Wilayah."

<sup>3</sup> Patrik, Rotinsulu, and Jocom, "Analisis Hirarki Pusat Pelayanan Perkotaan Di Kota Bitung."

<sup>4</sup> Robinson, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*.

<sup>5</sup> Gunawan, Rahajuni, and Dkk, *Ragam Pemikiran Pembangunan Ekonomi Perdesaan*.

<sup>6</sup> Novriyadi, "Peta Sumatera Utara Lengkap Dengan Nama Kota."

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 71.680 km<sup>2</sup>, Sumatera Utara tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan. Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Selain komoditas perkebunan, Sumatera Utara juga dikenal sebagai penghasil komoditas hortikultura (sayur-mayur dan buah-buahan); misalnya Jeruk Medan, Jambu Deli, Sayur Kol, Tomat, Kentang, dan Wortel yang dihasilkan oleh Kabupaten Karo, Simalungun dan Tapanuli Utara. Produk hortikultura tersebut telah diekspor ke Malaysia dan Singapura.<sup>7</sup>

### **Analisis Hirarki**

Hierarki perkotaan mencerminkan tingkat fungsi perkotaan yang timbul akibat variasi dalam jumlah, jenis, dan kualitas fasilitas yang ada di suatu kota.<sup>8</sup> Berdasarkan perbedaan ini, pelayanan yang dapat diberikan oleh setiap jenis fasilitas juga bervariasi baik dari segi volume maupun keragaman. Biasanya, perbedaan fungsi ini terkait erat dengan ukuran kota, seperti jumlah penduduk, dan sekaligus mencerminkan perbedaan luas wilayah. Metode yang digunakan dalam analisis hirarki diantaranya:

1. Analisis Skalogram, analisis ini dilakukan untuk mengetahui pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan jenis unit fasilitas pelayanan yang ada dalam setiap daerah. Asumsi yang digunakan apabila suatu wilayah memiliki ranking tertinggi maka lokasi atau wilayah tersebut dapat ditetapkan menjadi suatu pusat pelayanan.
2. Analisis Indeks Sentralitas, digunakan untuk mengetahui struktur/hirarki pusat-pusat pelayanan yaitu dengan mengidentifikasi pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan, seberapa banyak fungsi yang ada, beberapa jenis fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman.

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi Kabupaten/Kota yang dapat dikelompokkan menjadi calon pusat pelayanan berdasarkan pada fasilitas pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial. Manfaat digunakannya analisis hirarki pusat pelayanan perkotaan adalah mengetahui jenis fasilitas dan jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi yang menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di suatu wilayah. Hasil dari penelitian ini bisa dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut dalam mengkaji struktur ruang, pusat pelayanan dan permasalahannya.

## **METHODS**

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, di lakukan pada bulan Januari 2024. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera

<sup>7</sup> Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, "Profil Provinsi Sumatera Utara."

<sup>8</sup> Robinson, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*.

Utara mengambil data pada tahun terbaru. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>9</sup> Data dalam bentuk tabulasi maupun deskriptif meliputi kondisi geografis wilayah penelitian, jumlah dan jenis fasilitas perkotaan, jumlah penduduk, dan jarak antar wilayah, dan peta-peta yang terkait dengan penelitian. Instansi yang terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara serta instansi lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Telaah Pustaka. Telaah Pustaka yakni, cara Pengumpulan data dan informasi melalui telaah pustaka dilakukan dengan cara studi literatur seperti membaca jurnal, buku, laporan/dokumen teknis, dan sumber-sumber bacaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Beberapa Instrumen analisis yang diterapkan dalam studi:

1. Analisis skalogram

Analisis Skalogram merupakan teknik yang digunakan untuk mengkategorikan pemukiman berdasarkan kompleksitas fungsi pelayanan yang mereka sediakan, sambil mengidentifikasi jenis dan variasi layanan serta fasilitas yang tersedia di sekitar pusat-pusat pelayanan dengan berbagai tingkat.<sup>10</sup>

2. Indeks Sentralitas

Untuk mengetahui struktur/hirarki pusat-pusat pelayanan digunakan indeks sentralitas, yaitu dengan mengidentifikasi pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan, seberapa banyak fungsi yang ada, beberapa jenis fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman.<sup>11</sup>

Terdapat rumus untuk pengujian kelayakan skalogram, digunakan perhitungan *Coeffisien of Reproducibility* (COR)

$$(COR) \text{ COR} = 1 - \frac{\sum e}{N \times K}$$

Keterangan:

e = jumlah kesalahan

N = jumlah subyek/kota

K = jumlah obyek/ fasilitas

Dalam hal ini koefisien dianggap layak apabila bernilai 0,9 – 1.

### **Pelayanan Umum di Provinsi Sumatera Utara**

1. Fasilitas Pendidikan: Dari ketersediaan fasilitas pendidikan yang ada di Provinsi Sumatera Utara yaitu TK, SD, SMP, SMA, SMK.
2. Fasilitas Kesehatan: Dari ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Sumatera Utara yaitu rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poli klinik, klinik/ balai kesehatan dan posyandu.

---

<sup>9</sup> Utari, "Analisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman Di Kota Yogyakarta Tahun 2014."

<sup>10</sup> Utari.

<sup>11</sup> Utari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Skalogram

Dalam menganalisis calon wilayah pusat pertumbuhan yang baru berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan ini digunakan teknik analisis skalogram. Analisis ini akan mengidentifikasi Kabupaten / Kota yang dapat dikelompokkan menjadi calon pusat pertumbuhan berdasarkan pada fasilitas pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial dan pemerintahan.

Berdasarkan perhitungan skalogram, jumlah error yang diperoleh dari 33 Kabupaten (N) dan 11 fasilitas (F) di Provinsi Sumatera Utara. Dari 11 jenis fasilitas yang didata, jumlah jenis fasilitas tertinggi yang ada dalam Kabupaten/Kota adalah 11 jenis fasilitas pada Kabupaten Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Toba, Labuhan Batu, Asahan, Simalungun, Dairi, Karo, Deli Serdang, Langkat, Nias Selatan, Humbang Hasandutan, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Labuanbatu Selatan, Labuanbatu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Tanjung Balai, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Binjai, Padang Sidempuan, Gunung Sitoli sementara yang terendah ialah 3 jenis fasilitas pada Kabupaten Tapanuli Tengah.

Untuk menguji kelayakan skalogram, digunakan perhitungan Coeffisien of Reproducibility

$$(\text{COR}) \text{COR} = \frac{1 - \sum e}{N \times K}$$

$$\text{COR} = \frac{1 - 9}{33 \times 11}$$

$$\text{COR} = 0,977 \text{ dibulatkan menjadi } 0,9$$

Sesuai ketentuan, nilai Coeffisien of Reproducibility (COR) yang layak untuk dianalisis adalah  $\geq 0,9$ . Nilai COR dari data fasilitas Provinsi Sumatera Utara adalah 0,977 sehingga layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

Dengan memperhitungkan selisih antara jumlah jenis fasilitas tertinggi yang ada dalam satu Kabupaten /Kota dan jumlah jenis fasilitas terendah kemudian dibagi dengan banyaknya Kabupaten/Kota, maka Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 12 klasifikasi.

$$\begin{aligned} \text{Range} &= (\text{jumlah tertinggi-jumlah terendah})/\text{jumlah orde} \\ &= (11-3)/4 \\ &= 2 \end{aligned}$$

**Tabel 1.** Hasil Range Orde Skalogram

Orde	Range
Orde I	>9.01-11
Orde II	>7.01-9
Orde III	>5.01-7
Orde IV	>3.01-5

*Sumber:* Hasil Olahan Sendiri

Hasil analisis skalogram pada setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara didapatkan hasil, Kelompok I merupakan kelompok Kabupaten dengan tingkat keberadaan fasilitas yang

tertinggi yakni Kabupaten/Kota yang memiliki range >9.01-11 Orde I jenis fasilitas yaitu Kabupaten/Kota Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba, Labuhanbatu, Asahan, Simalungun, Dairi, Karo, Deli Serdang, Langkat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Tanjung Balai, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, Padang Sidempuan, Gunung Sitoli. Kabupaten yang kelompok II dengan tingkat range >3.01-5 Orde IV yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Tabel 2.** Hasi Tingkatan Orde I-IV

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk	Jumlah Jenis Fasilitas	Orde
1	Kabupaten Nias	149249	11	I
2	Kabupaten Mandailing Natal	484874	11	I
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	307312	10	I
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	3374734	3	IV
5	Kabupaten Tapanuli Utara	318424	11	I
6	Kabupaten Toba	212133	11	I
7	Kabupaten Labuhan Batu	508024	11	I
8	Kabupaten Asahan	787681	11	I
9	Kabupaten Simalungun	1021615	11	I
10	Kabupaten Dairi	315460	11	I
11	Kabupaten Karo	414429	11	I
12	Kabupaten Deli Serdang	1953986	11	I
13	Kabupaten Langkat	1039926	11	I
14	Kabupaten Nias Selatan	373674	11	I
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	202299	11	I
16	Kabupaten Pakpak Barat	54609	11	I
17	Kabupaten Samosir	139337	11	I
18	Kabupaten Serdang Bedagai	667998	11	I
19	Kabupaten Batu Bara	416367	11	I
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	267275	11	I
21	Kabupaten Padang Lawas	267275	10	I
22	Kabupaten Labuanbatu Selatan	320324	11	I
23	Kabupaten Labuanbatu Utara	390954	11	I
24	Kabupaten Nias Utara	150780	11	I
25	Kabupaten Nias Barat	91346	11	I
26	Kota Sibolga	90366	11	I

27	Kota Tanjung Balai	179748	11	I
28	Kota Pematangsiantar	274056	11	I
29	Kota Tebing Tinggi	177786	11	I
30	Kota Medan	2494512	10	I
31	Kota Binjai	300009	11	I
32	Kota Padang Sidempuan	231062	11	I
33	Kota Gunung Sitoli	137583	11	I

Sumber: Olahan Sendiri

Berdasarkan hasil analisis skalogram di atas, dapat dilihat bahwa terdapat Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk besar akan tetapi tingkat keberagaman fasilitas yang ada pada Kabupaten tersebut rendah. Jadi, untuk menentukan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan baru tidak cukup dilihat dari segi keberagaman fasilitasnya saja, tetapi juga mempertimbangkan frekuensi pada setiap jenis fasilitas tersebut. Tingkat frekuensi fasilitas pada suatu Kabupaten mempengaruhi indeks sentralitas Kabupaten tersebut, semakin besar frekuensinya maka semakin tinggi nilai sentralitasnya.

#### Analisis Indeks Sentralitas

Untuk menentukan Kabupaten/kota sebagai pusat pelayanan dalam penelitian ini tidak cukup hanya melihat keberagaman fasilitasnya saja seperti pada analisis skalogram, tetapi juga harus mempertimbangkan frekuensi setiap jenis fasilitas tersebut. Tingkat frekuensi fasilitas pada suatu Kabupaten/kota mempengaruhi indeks sentralitas Kabupaten/kota tersebut. Semakin tinggi frekuensinya maka akan semakin besar nilai sentralitasnya dan menjadikan suatu wilayah sebagai pusat pelayanan di perkotaan .

**Tabel 3.** Hasil Analisis Indeks Skalogram

No	Kabupaten/Kota	IPD	Jumlah Jenis Fasilitas	Hierarki
1	Kabupaten Nias	19.55536704	11	Hirarki3
2	Kabupaten Mandailing Natal	19.44252596	11	Hirarki3
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	18.5474846	10	Hirarki3
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	0.418193808	3	Hirarki3
5	Kabupaten Tapanuli Utara	19.90311294	11	Hirarki1
6	Kabupaten Toba	21.30079437	11	Hirarki1
7	Kabupaten Labuhan Batu	15.61808549	11	Hirarki3
8	Kabupaten Asahan	16.51614016	11	Hirarki3
9	Kabupaten Simalungun	15.90353262	11	Hirarki3
10	Kabupaten Dairi	19.93923145	11	Hirarki1
11	Kabupaten Karo	19.38067533	11	Hirarki3
12	Kabupaten Deli Serdang	16.57538533	11	Hirarki3
13	Kabupaten Langkat	17.53454391	11	Hirarki3
14	Kabupaten Nias Selatan	26.25453911	11	Hirarki1
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	17.08681589	11	Hirarki3

16	Kabupaten Pakpak Barat	29.1509363	11	<b>Hirarki1</b>
17	Kabupaten Samosir	24.36536304	11	<b>Hirarki1</b>
18	Kabupaten Serdang Bedagai	19.90480559	11	<b>Hirarki1</b>
19	Kabupaten Batu Bara	17.26080554	11	<b>Hirarki3</b>
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	15.54131426	11	<b>Hirarki3</b>
21	Kabupaten Padang Lawas	17.09130813	10	<b>Hirarki3</b>
22	Kabupaten Labuanbatu Selatan	18.38274023	11	<b>Hirarki3</b>
23	Kabupaten Labuanbatu Utara	16.30708687	11	<b>Hirarki3</b>
24	Kabupaten Nias Utara	24.03610537	11	<b>Hirarki1</b>
25	Kabupaten Nias Barat	35.93367751	11	<b>Hirarki1</b>
26	Kota Sibolga	22.22931152	11	<b>Hirarki1</b>
27	Kota Tanjung Balai	16.72121962	11	<b>Hirarki3</b>
28	Kota Pematangsiantar	24.08591155	11	<b>Hirarki1</b>
29	Kota Tebing Tinggi	21.60750146	11	<b>Hirarki1</b>
30	Kota Medan	21.32155943	10	<b>Hirarki1</b>
31	Kota Binjai	23.7809858	11	<b>Hirarki1</b>
32	Kota Padang Sidempuan	16.56167455	11	<b>Hirarki3</b>
33	Kota Gunung Sitoli	19.46969935	11	<b>Hirarki3</b>

*Sumber:* Olahan Sendiri

Berdasarkan hasil analisis di atas, Kabupaten/Kota yang masuk Hierarki I ialah Tapanuli Utara, Toba, Dairi, Nias Selatan, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Medan, dan Binjai. Pada Hierarki III terdapat Kabupaten/Kota Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Labuhanbatu, Asahan, Simalungun, Karo, Deli Serdang, Langkat, Humbang Hasundutan, Baru Bara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tanjung Balai, Padang Sidempuan, Gunung Sitoli. Hal ini menunjukkan Kabupaten/Kota Tapanuli Utara, Toba, Dairi, Nias Selatan, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Medan, dan Binjai merupakan wilayah yang menarik bagi penduduk untuk melakukan aktivitas di wilayah tersebut karna tersedianya berbagai fasilitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Kabupaten yang terletak pada hirarki I akan sebagai pusat pelayanan perkotaan bagi Kabupaten/kota yang mempunyai hirarki III. Orang-orang yang datang ke daerah tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhannya pada lokasi yang berdekatan. Orang akan datang ke sana untuk berbelanja, sekolah, dan lainnya. Hal ini menjadi daya Tarik bagi wilayah tersebut untuk dikunjungi sehingga meningkatkan volume transaksi.

Pusat pertumbuhan merupakan tempat atau lokasi pusat kegiatan jasa dan perdagangan yang memiliki daya tarik yang besar dimana daerah-daerah sekitarnya juga menyokong tempat sentral tersebut dengan menyediakan sumber daya, yang tentunya tempat sentral ini akan memberikan pengaruh terhadap wilayah-wilayah disekitarnya tersebut juga pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alternatif untuk menggerakkan dan memacu pembangunan guna

meningkatkan pendapatan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis skalogram, hirarki I terletak pada Kabupaten/Kota Tapanuli Utara, Toba, Dairi, Nias Selatan, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Medan, dan Binjai. Kabupaten/Kota ini dapat dijadikan sebagai pusat pelayanan perkotaan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada wilayah tersebut akan menjadi panutan baik dari kebutuhan yang bersifat primer maupun sekunder bagi wilayah yang tidak termasuk apada hirarki I, hal ini mencakup dari berbagai bidang seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi pada wilayah Provinsi Sumatera Utara.

## REFERENSI

- Admin. "Potensi Pengembangan Wilayah," 2024.  
<https://www.sumutprov.go.id/artikel/artikel/potensi-pengembangan-wilayah>.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. "Profil Provinsi Sumatera Utara," 2024.  
<https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/236/>.
- Gunawan, Diah Setyoniri, Dijan Rahajuni, and Dkk. *Ragam Pemikiran Pembangunan Ekonomi Perdesaan*. Edited by Dina Mellita. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Novriyadi. "Peta Sumatera Utara Lengkap Dengan Nama Kota," 2023.  
<https://www.lamudi.co.id/journal/peta-sumatera-utara/>.
- Patrik, Lalu Renaldo, Wieske Ch. Rotinsulu, and Sherly G. Jocom. "Analisis Hirarki Pusat Pelayanan Perkotaan Di Kota Bitung." *Jurnal Agri-SosioEkonomi* Volume 17, no. Nomor 1 (2021): Pages 541-548. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/35413/33127>.
- Robinson, Tarigan. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Edisi Revi. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Tata, Rencana, Ruang Wilayah, and Provinsi Sumatera. "BAB 3 Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara," 2013, 1-56.
- Utari, MG. Endang Sri. "Analisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman Di Kota Yogyakarta Tahun 2014." *Jejak* 8, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3856>.